



RINGKASAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
DAN
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2023



Drs TRI SAKTIYANA, M Si
PJ. BUPATI KULON PROGO



TEMA PEMBANGUNAN

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan
Kualitas SDM yang Berkarakter dan Berbudaya



PRIORITAS PEMBANGUNAN

- Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial
- Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berbudaya
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
- Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Publik

TARGET KINERJA

A. Tujuan Daerah



Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Gini Ratio: 0,361 – 0,404
Pertumbuhan Ekonomi: 4,7% – 5,6%
Angka Kemiskinan: 16,92% – 17,14%



Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berbudaya
Indeks Pembangunan Manusia: 75,45
Persentase Pelestarian & Pengembangan Budaya Daerah: 53,60%



Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan
Indeks Pembangunan Berkelanjutan: 74,38



Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Indeks Reformasi Birokrasi: 75,00



Terwujudnya keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan
Indeks Ketertiban dan Ketenteraman: 81,48

B. Sasaran Daerah



Meningkatnya pendapatan masyarakat
Pendapatan perkapita Penduduk: 30,87 juta rupiah
Tingkat Pengangguran Terbuka: 2,64% – 3,42%



Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Rata-rata Lama Sekolah: 9,15 tahun
Harapan Lama Sekolah: 14,29 tahun



Meningkatnya prestasi generasi muda
Persentase Pemuda Berprestasi dan Atlet Berprestasi: 74,34%



Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah
Persentase Pelestarian & Pengembangan Budaya Daerah: 53,60%



Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup: 75,31 tahun
Indeks Keluarga Sehat: 0,29



Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah
Indeks Pembangunan Infrastruktur: 49,27



Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 62,53



Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang: 88,55%



Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Nilai AKIP: A
Opini BPK: WTP
Indeks Kepuasan Masyarakat: 84,25



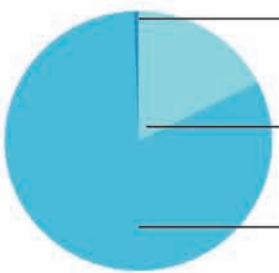
Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana
Persentase Penanggulangan Bencana: 97,16%



Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, & kehidupan bermasyarakat yang kondusif
Persentase Peningkatan Penegakan Perda & Penanganan Konflik Sosial: 100%



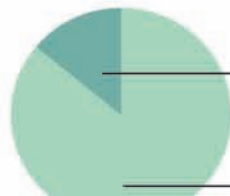
PENDAPATAN DAERAH
Rp 1.602.783.129.755,00



- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp 8.000.000.000,00
0,50%
- Pendapatan Asli Daerah
Rp 281.331.590.510,00
17,55%
- Pendapatan Transfer
Rp 1.313.451.539.245,00
81,95%



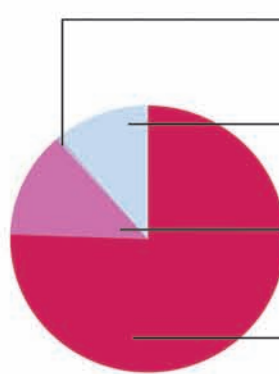
- Pajak Daerah
Rp 104.777.613.000,00
37,24%
- Retribusi Daerah
Rp 10.718.221.842,00
3,81%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Rp 17.399.540.792,00
6,18%
- Lain-lain PAD yang Sah
Rp 148.436.214.876,00
52,76%



- Pendapatan Transfer Antar Daerah
Rp 184.014.734.245,00
14,01%
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Rp 1.129.436.805.000,00
85,99%



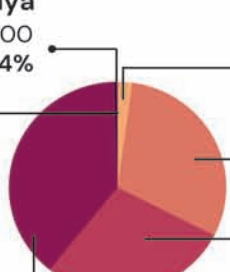
BELANJA DAERAH
Rp 1.623.397.757.352,00



- Belanja Tidak Terduga
Rp 7.760.756.803,00
0,48%
- Belanja Modal
Rp 208.796.398.853,00
12,86%
- Belanja Transfer
Rp 180.461.919.384,00
11,12%
- Belanja Operasi
Rp 1.226.378.682.312,00
75,54%

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Rp 704.259.200,00
0,34%

Belanja Modal Aset Lainnya
Rp 256.700.000,00
0,12%

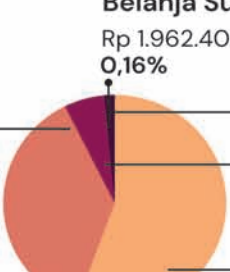


- Belanja Modal Tanah
Rp 4.513.733.600,00
2,16%
- Belanja Modal Peralatan & Mesin
Rp 63.371.881.553,00
30,35%
- Belanja Modal Gedung & Bangunan
Rp 59.014.194.100,00
28,26%
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, & Irigasi
Rp 80.935.630.400,00
38,76%



- Belanja Bagi Hasil
Rp 11.549.583.484,00
6,40%
- Belanja Bantuan Keuangan
Rp 168.912.335.900,00
93,60%
- Belanja Subsidi
Rp 1.962.404.000,00
0,16%

Belanja Barang & Jasa
Rp 453.377.579.260,00
36,97%



- Belanja Bantuan Sosial
Rp 18.457.250.000,00
1,51%
- Belanja Hibah
Rp 70.797.932.804,00
5,77%
- Belanja Pegawai
Rp 681.783.516.248,00
55,59%



DEFISIT (ditutup dengan pembiayaan netto)
Rp 20.614.627.597,00

Penerimaan Pembiayaan
(SiLPA Tahun Sebelumnya)
Rp 53.487.820.000,00



PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan
(Penyertaan Modal Daerah)
Rp 32.873.192.403,00

Pembiayaan Netto
Rp 20.614.627.597,00

ALOKASI ANGGARAN PER URUSAN

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	60,44%
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	9,45%
Urusan Pemerintahan Pilihan	3,25%
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4,35%
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	20,44%
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	0,35%
Unsur Kewilayahan	1,46%
Unsur Pemerintahan Umum	0,26%



Drs. TRI SAKTIYANA, M.Si.